

Penguatan Peran Pendamping Koperasi Merah Putih Kabupaten Bandung Melalui Konsultasi Manajemen Koperasi Berbasis Kinerja dan Tata Kelola

Nanik Risnawati

Universitas Koperasi Indonesia

nanikrisnawati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pendamping Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kinerja, tata kelola, dan keberlanjutan koperasi di tingkat lokal. Namun demikian, efektivitas pendampingan sering kali terkendala oleh keterbatasan kapasitas pendamping dalam melakukan konsultasi manajemen koperasi yang sistematis, berbasis data, dan berorientasi solusi. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi pendamping koperasi dalam menjalankan fungsi konsultatif, khususnya dalam mengidentifikasi permasalahan manajerial, menganalisis akar masalah, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang aplikatif sesuai dengan karakteristik koperasi. Pendekatan pelatihan mengintegrasikan konsep manajemen koperasi modern, prinsip tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*), serta praktik konsultasi manajemen yang adaptif terhadap dinamika koperasi dan anggota. Materi pelatihan disampaikan melalui metode partisipatif, meliputi pemaparan konseptual, studi kasus koperasi, dan diskusi kelompok. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan analitis dan komunikatif yang dibutuhkan dalam proses pendampingan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah meningkatnya kapasitas pendamping Koperasi Merah Putih dalam memberikan layanan konsultasi manajemen yang efektif, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja koperasi. Pelatihan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan peran pendamping sebagai mitra strategis koperasi dalam mendorong transformasi kelembagaan, peningkatan daya saing usaha, serta keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Key word: Penguatan Pendamping, Konsultasi Manajemen Koperasi, GCG, Keberlanjutan KDMP

ABSTRACT

Merah Putih (Red and White) Cooperative Facilitators play a strategic role in enhancing the performance, governance, and sustainability of cooperatives at the local level. However, the effectiveness of facilitation is often constrained by limited capacity in delivering systematic, data-driven, and solution-oriented cooperative management consulting. This training program is designed to strengthen facilitators' competencies in performing consultative functions, particularly in identifying managerial problems, analyzing root causes, and formulating practical and context-specific recommendations for cooperative development. The training approach integrates modern cooperative management concepts, principles of good cooperative governance, and adaptive management consulting practices tailored to cooperative dynamics. Learning methods are implemented through participatory approaches, including conceptual lectures, cooperative case studies, group discussions, and field-based consultation simulations. This approach enables participants to develop not only conceptual understanding but also analytical and communication skills essential for effective cooperative facilitation. The expected outcome of the training is an enhanced capacity of Red and White Cooperative Facilitators to provide structured, effective, and performance-oriented management consulting services. Ultimately, this training is expected to strengthen the role of facilitators as strategic partners in supporting institutional transformation, improving business competitiveness, and ensuring the long-term sustainability of cooperatives as key pillars of the people-centered economy.

Keywords: Cooperative Facilitation; Cooperative Management Consulting; Good Cooperative Governance; Cooperative Sustainability

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian kerakyatan yang dirancang untuk menghadirkan keadilan ekonomi, memperkuat kemandirian anggota, dan mendorong pembangunan inklusif. Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks, koperasi dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing. Transformasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola dan kemampuan manajemen koperasi dalam merespons perubahan lingkungan usaha.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Pendamping Koperasi Merah Putih menjadi sangat strategis. Pendamping tidak lagi diposisikan semata sebagai fasilitator administratif, melainkan sebagai mitra perubahan yang berperan aktif dalam membantu koperasi mengenali permasalahan, merumuskan solusi, serta membangun kapasitas kelembagaan dan usaha secara berkelanjutan. Peran ini menuntut pendamping untuk memiliki kompetensi konsultatif yang kuat, khususnya dalam bidang manajemen koperasi.

Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi masih menghadapi persoalan mendasar seperti lemahnya perencanaan usaha, rendahnya kualitas pengambilan keputusan, kurang optimalnya pengelolaan sumber daya, serta belum diterapkannya prinsip tata kelola koperasi yang baik. Kondisi ini sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendampingan teknis jangka pendek, melainkan membutuhkan pendekatan konsultasi manajemen yang sistematis, berbasis analisis, dan berorientasi pada solusi jangka panjang.

Konsultasi manajemen koperasi menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi aktual koperasi dan kondisi ideal yang diharapkan. Melalui proses konsultasi yang tepat, koperasi didorong untuk memahami akar permasalahan secara komprehensif, meningkatkan kapasitas pengelolaan organisasi dan usaha, serta merancang langkah perbaikan yang realistis dan kontekstual. Dalam hal ini, pendamping berperan sebagai katalisator yang membantu koperasi menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendamping melalui pelatihan konsultasi manajemen koperasi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga untuk menumbuhkan cara berpikir strategis, sikap profesional, dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam proses pendampingan. Dengan pendamping yang kompeten dan berdaya, koperasi diharapkan mampu tumbuh menjadi organisasi yang tangguh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Keberhasilan pengembangan koperasi bukan semata ditentukan oleh besarnya modal atau skala usaha, melainkan oleh kualitas manusia yang mendampinginya. Ketika pendamping hadir dengan pengetahuan, integritas, dan semangat perubahan, koperasi tidak hanya dikelola dengan lebih baik, tetapi juga bergerak maju sebagai kekuatan ekonomi yang bermartabat dan berkeadilan.

II. METODE

1. Kegiatan pelatihan untuk pendamping koperasi desa merah putih ini diselenggarakan di Dusun Strawberry Walini dan Petik Strawberry. Kampung Ranca Walini Kecamatan Ciwidey. Kabupaten Bandung pada bulan September 2025, merupakan kegiatan yang dilaksanakan hasil kerjasama antara Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dalam kegiatan pelatihan ini tim yang ikut terlibat di antaranya para nara sumber yaitu para dosen Ikopin University, panitia dari Dinas koperasi Kabupaten Bandung dan peserta yang telah lolos seleksi sebagai tenaga pendamping KDMP Kabupaten Bandung.
3. Materi yang disampaikan berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang konsultan manajemen yang baik untuk dapat membantu koperasi desa merah putih dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi untuk menjalankan organisasinya secara baik dengan menggunakan bahan tayangan berupa *Power Point* dan studi kasus.

4. Dalam pelatihan ini para pesertanya terdiri dari para tenaga pendamping Koperasi Desa Merah Putih se Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang.
5. Penyampaian materi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Pendidikan bagi orang dewasa (Andragogi) dan partisipatif yaitu berupa ceramah, tanya jawab serta diskusi yang dilakukan secara interaktif, serta latihan mencari solusi atas studi kasus masalah yang dihadapi oleh sebuah koperasi. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan mengenai ruang lingkup konsultasi manajemen koperasi, tahapan proses konsultasi manajemen, bagaimana peran konsultan dan pihak koperasi, tantangan yang biasa dihadapi para konsultan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengawali bimtek ini terlebih dahulu diajukan pertanyaan kepada peserta, apa sebenarnya tugas pendamping Koperasi Desa Merah Putih. Mereka mengatakan bahwa tugas pendamping adalah sebagai konsultan koperasi khususnya pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan pengawas koperasi KDMP agar dapat menjalankan fungsinya yaitu mensejahterakan anggota dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kebutuhan anggotanya.

Kemudian dijelaskan kepada peserta apa sebenarnya konsep konsultasi manajemen koperasi. Konsultasi manajemen koperasi adalah proses pendampingan profesional untuk membantu koperasi menganalisis masalah, merumuskan strategi, dan meningkatkan kinerja organisasi sesuai prinsip koperasi (ICA, 2021). Konsultan berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan berbasis data, bukan sekadar “pemberi nasihat”.

Dalam konteks bahwa tenaga pendamping akan berperan sebagai konsultannya KDMP, yang *nota bene* adalah koperasi yang pendiriannya dilakukan secara massal di semua kecamatan di Indonesia, di mana merupakan koperasi yang dibangun secara *top down*, maka ada banyak hal yang perlu didampingi dan diberikan konsultasi untuk kelancaran jalannya organisasi KDMP. Maka terlebih dahulu dijabarkan tujuan dilakukannya Konsultasi manajemen koperasi pada KDMP.

Konsultasi manajemen koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilaksanakan sebagai instrumen strategis untuk memastikan koperasi desa mampu berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi desa yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Konsultasi ini diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki aspek teknis pengelolaan koperasi, tetapi juga untuk memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sejalan dengan agenda pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Secara spesifik tujuan tersebut meliputi:

Menguatkan Kelembagaan KDMP sebagai Pilar Ekonomi Desa

Salah satu tujuan utama konsultasi manajemen adalah memperkuat kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih agar memiliki tata kelola yang sehat dan kredibel. Dalam konteks KDMP, konsultasi bertujuan untuk:

1. Menata struktur organisasi koperasi desa agar selaras dengan kebutuhan pelayanan ekonomi masyarakat desa;
2. Memastikan penerapan prinsip koperasi dan kepatuhan terhadap regulasi perkoperasian;
3. Menguatkan fungsi Rapat Anggota sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan desa berbasis musyawarah.

Penguatan kelembagaan ini penting agar KDMP tidak hanya berstatus formal, tetapi benar-benar menjadi institusi ekonomi desa yang dipercaya dan dimiliki oleh masyarakat.

Meningkatkan Kapasitas Manajerial Pengurus KDMP

Konsultasi manajemen bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dan pengelola KDMP dalam mengelola koperasi secara profesional. Melalui konsultasi, pengurus KDMP didorong untuk:

1. Memahami fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian usaha koperasi;
2. Mengelola koperasi desa secara transparan dan akuntabel;
3. Mengambil keputusan usaha berbasis data dan potensi ekonomi desa.

Tujuan ini sejalan dengan arah KDMP untuk mencetak pengelola koperasi desa yang kompeten dan berdaya saing.

Mengoptimalkan Peran KDMP dalam Pengembangan Usaha Produktif Desa

Konsultasi manajemen koperasi bertujuan membantu KDMP dalam merancang dan mengembangkan unit usaha yang relevan dengan potensi lokal desa. Dalam kerangka KDMP, konsultasi diarahkan untuk:

1. Mengidentifikasi komoditas unggulan dan peluang usaha desa;
2. Menyusun model bisnis koperasi desa yang berorientasi pada nilai tambah dan hilirisasi;
3. Meningkatkan kontribusi koperasi terhadap pendapatan anggota dan ekonomi desa.

Dengan demikian, KDMP berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar lembaga simpan pinjam.

Memperkuat Partisipasi dan Kemandirian Anggota KDMP

Konsultasi manajemen dalam KDMP bertujuan mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa sebagai anggota koperasi. Melalui pendekatan partisipatif, konsultasi diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran anggota terhadap hak dan kewajiban dalam koperasi;
2. Membangun rasa memiliki terhadap KDMP sebagai aset ekonomi bersama;
3. Mendorong kemandirian koperasi desa dalam mengelola usaha dan menyelesaikan permasalahan internal.

Partisipasi anggota menjadi kunci keberlanjutan KDMP sebagai koperasi berbasis komunitas desa.

Mendukung Transformasi dan Inovasi Koperasi Desa Merah Putih

Dalam menghadapi tantangan global dan nasional, konsultasi manajemen bertujuan membantu KDMP beradaptasi terhadap perubahan. Konsultasi difokuskan untuk:

1. Mendorong penerapan inovasi manajemen dan digitalisasi sederhana sesuai kapasitas desa;
2. Meningkatkan daya saing KDMP di tengah persaingan pasar;
3. Menyiapkan koperasi desa agar tangguh terhadap perubahan kebijakan dan dinamika ekonomi.

Transformasi ini penting agar KDMP tidak tertinggal dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Menjadikan KDMP sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Secara strategis, tujuan akhir konsultasi manajemen koperasi dalam KDMP adalah menjadikan koperasi desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Konsultasi diarahkan agar KDMP:

1. Berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
2. Mendukung penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal;
3. Menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi berbasis gotong royong.

Dengan demikian, konsultasi manajemen koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar kegiatan pendampingan teknis, tetapi merupakan strategi penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberhasilan konsultasi tercermin dari meningkatnya kapasitas pengurus, kinerja usaha koperasi, partisipasi anggota, serta kontribusi nyata KDMP terhadap pembangunan ekonomi desa. Agar tujuan besar dilaksanakannya pendampingan tersebut dapat berjalan efektif, maka para pendamping perlu mempersiapkan diri dengan bidang-bidang penting yang menjadi lingkup konsultasi manajemen.

Ruang lingkup Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK) pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dirancang untuk memperkuat koperasi desa sebagai lembaga ekonomi rakyat yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan. KMK mencakup aspek kelembagaan, manajerial, usaha, dan sumber daya manusia yang saling terintegrasi dalam mendukung peran strategis KDMP sebagai penggerak utama ekonomi desa.



Gambar 1.
Sesi Penyampaian Mater I

Tata Kelola KDMP (*Governance*)

Konsultasi pada aspek tata kelola bertujuan memastikan KDMP dikelola sesuai prinsip koperasi, nilai demokrasi ekonomi, serta regulasi perkoperasian yang berlaku. Ruang lingkup konsultasi meliputi:

1. **Rapat Anggota:** Pendampingan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Khusus agar berjalan tertib, partisipatif, dan menghasilkan keputusan strategis yang berkualitas.
2. **Struktur Kepengurusan:** Evaluasi dan penataan struktur pengurus, pengawas, dan pengelola agar pembagian tugas dan tanggung jawab jelas serta tidak tumpang tindih.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penyusunan mekanisme pelaporan kinerja dan keuangan koperasi yang mudah dipahami anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus.

Penguatan tata kelola ini menjadi fondasi kepercayaan anggota dan legitimasi KDMP di tingkat desa.

Perencanaan Strategis

Konsultasi manajemen pada aspek perencanaan strategis bertujuan membantu KDMP memiliki arah pengembangan usaha yang jelas dan terukur. Ruang lingkupnya mencakup:

1. **Analisis SWOT:** Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman koperasi desa berbasis potensi lokal dan kondisi lingkungan eksternal.

2. **Penyusunan Rencana Bisnis:** Pendampingan penyusunan rencana bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang yang realistis serta sesuai dengan kapasitas koperasi desa.
3. **Penetapan Target Kinerja:** Perumusan sasaran usaha dan kelembagaan sebagai dasar evaluasi kinerja KDMP.

Perencanaan strategis ini menjadikan KDMP tidak berjalan secara reaktif, tetapi terarah dan berkelanjutan.

Manajemen Keuangan

Aspek manajemen keuangan menjadi fokus utama KMK karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan koperasi. Ruang lingkup konsultasi meliputi:

1. **Sistem Akuntansi Koperasi:** Pendampingan penerapan sistem pencatatan keuangan yang sesuai standar akuntansi koperasi dan mudah diterapkan di tingkat desa.
2. **Pengendalian Kas dan Aset:** Penyusunan prosedur pengelolaan kas, simpanan anggota, dan aset koperasi untuk mencegah penyimpangan.
3. **Audit Internal:** Penguatan fungsi pengawasan melalui audit internal sederhana sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Manajemen keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan anggota dan mitra terhadap KDMP.

Pengembangan Usaha

Konsultasi pengembangan usaha bertujuan mengoptimalkan peran KDMP sebagai penggerak ekonomi produktif desa. Ruang lingkupnya meliputi:

1. **Diversifikasi Produk dan Jasa:** Identifikasi peluang usaha baru yang relevan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa.
2. **Analisis Pasar:** Pendampingan analisis permintaan, preferensi konsumen, dan potensi pasar lokal maupun regional.
3. **Inovasi Model Bisnis:** Pengembangan model bisnis koperasi desa yang adaptif, termasuk kemitraan dan hilirisasi produk desa.

Melalui pengembangan usaha, KDMP diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi anggota.

Transformasi Digital

Transformasi digital dalam KMK bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing KDMP secara bertahap dan kontekstual. Ruang lingkup konsultasi meliputi:

1. **Administrasi Digital:** Penerapan teknologi sederhana untuk pencatatan keanggotaan, keuangan, dan administrasi koperasi.
2. **Layanan Digital:** Pengembangan layanan berbasis digital untuk memudahkan anggota dalam mengakses informasi dan layanan koperasi.
3. **Pemasaran Digital:** Pendampingan pemanfaatan media digital untuk promosi produk dan jasa KDMP.

Transformasi digital dilakukan secara adaptif agar sesuai dengan kapasitas SDM dan infrastruktur desa.

SDM dan Kepemimpinan

Aspek SDM dan kepemimpinan menjadi kunci keberlanjutan KDMP. Konsultasi pada aspek ini meliputi:

1. **Rekrutmen dan Penempatan SDM:** Pendampingan penempatan pengelola koperasi sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
2. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Penyusunan program pelatihan manajerial dan kewirausahaan bagi pengurus dan pengelola KDMP.
3. **Evaluasi Kinerja dan Suksesi Kepemimpinan:** Pendampingan sistem evaluasi kinerja serta penyiapan kader pemimpin koperasi desa.

Penguatan SDM dan kepemimpinan memastikan keberlanjutan KDMP lintas generasi.

Secara keseluruhan, ruang lingkup Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK) pada Koperasi Desa Merah Putih bersifat komprehensif dan integratif. Setiap aspek saling terkait dalam membentuk KDMP yang sehat secara kelembagaan, kuat secara usaha, dan berdaya saing sebagai pilar ekonomi desa.

Tahapan Proses Pelaksanaan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK)

Pelaksanaan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK) pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan partisipatif. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata koperasi desa, dapat diimplementasikan, serta berdampak berkelanjutan terhadap penguatan kelembagaan dan usaha koperasi.

Diagnosis Awal

Tahap diagnosis awal merupakan fondasi utama dalam proses konsultasi manajemen koperasi. Tujuan tahap ini adalah memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting KDMP secara objektif dan berbasis data. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. **Wawancara Pengurus dan Anggota**

Konsultan melakukan wawancara mendalam dengan pengurus, pengawas, pengelola, dan perwakilan anggota untuk menggali permasalahan manajerial, usaha, dan kelembagaan koperasi. Wawancara ini bertujuan memahami persepsi, harapan, serta dinamika internal koperasi desa.

2. **Studi Dokumen**

Konsultan menelaah dokumen koperasi seperti laporan keuangan, rencana kerja, notulen rapat anggota, dan dokumen kelembagaan lainnya. Studi dokumen berfungsi untuk memverifikasi informasi lapangan sekaligus menilai tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan prinsip koperasi.

3. **Identifikasi Masalah Inti**

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, konsultan mengidentifikasi masalah inti yang menghambat kinerja KDMP, baik dari aspek tata kelola, keuangan, usaha, maupun SDM. Identifikasi masalah ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang tepat sasaran.

Tahap diagnosis memastikan bahwa intervensi konsultasi tidak bersifat asumptif, melainkan berbasis kondisi riil koperasi desa.

Perencanaan Tindakan

Tahap ini bertujuan merumuskan langkah perbaikan yang realistis dan dapat diterapkan oleh KDMP. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Perumusan Rekomendasi

Konsultan menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan masalah inti yang telah diidentifikasi. Rekomendasi dirancang sesuai kapasitas KDMP, potensi desa, dan sumber daya yang tersedia.

2. Penyepakatan Prioritas dan Jadwal

Bersama pengurus dan anggota, konsultan menyepakati prioritas tindakan serta jadwal pelaksanaan. Proses ini menekankan prinsip partisipatif agar koperasi memiliki komitmen penuh terhadap rencana yang disusun.

Perencanaan tindakan menjembatani antara analisis masalah dan implementasi solusi secara konkret.

Implementasi

Implementasi merupakan fase penerapan rekomendasi konsultasi manajemen koperasi. Pada tahap ini, konsultan tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai pendamping proses perubahan. Kegiatan meliputi:

1. Pendampingan Pelaksanaan Rekomendasi

Konsultan mendampingi pengurus dan pengelola dalam menerapkan rekomendasi, seperti penataan administrasi, perbaikan sistem keuangan, atau pengembangan unit usaha koperasi desa.

2. Pelatihan dan Transfer Pengetahuan

Konsultan memberikan pelatihan teknis dan manajerial untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota. Transfer pengetahuan dilakukan agar koperasi mampu melanjutkan perbaikan secara mandiri setelah pendampingan berakhir.

Implementasi yang efektif memastikan bahwa rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dan tindak lanjut bertujuan menilai efektivitas proses konsultasi serta memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Monitoring Hasil

Konsultan bersama pengurus melakukan pemantauan terhadap perubahan kinerja koperasi, baik dari sisi kelembagaan, keuangan, maupun usaha. Monitoring dilakukan untuk mengukur capaian dan mengidentifikasi kendala lanjutan.

2. Rekomendasi Perbaikan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil monitoring, konsultan menyusun rekomendasi lanjutan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Tahap ini mendorong KDMP untuk terus berkembang dan beradaptasi.

Evaluasi dan tindak lanjut menjadikan konsultasi manajemen sebagai proses pembelajaran berkelanjutan bagi koperasi desa.

Peran Konsultan dan Pihak Koperasi dalam KMK

Keberhasilan konsultasi manajemen koperasi sangat ditentukan oleh kejelasan peran para pihak yang terlibat.

1. **Konsultan** berperan sebagai *fasilitator*, *analisis*, dan *mentor*. Konsultan membantu koperasi memahami masalah, merumuskan solusi, serta meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota tanpa mengambil alih kewenangan koperasi.

2. **Pengurus dan Anggota KDMP** berperan sebagai *pemilik keputusan, pelaksana perubahan, dan penyedia data*. Seluruh keputusan strategis dan implementasi rekomendasi tetap berada di tangan koperasi sebagai organisasi demokratis.

Pembagian peran ini menegaskan bahwa konsultasi bersifat kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan koperasi.

Tantangan Umum dalam Pelaksanaan Konsultasi Manajemen Koperasi

Dalam praktiknya, pelaksanaan KMK pada KDMP menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. **Resistensi terhadap Perubahan**

Sebagian pengurus atau anggota cenderung mempertahankan kebiasaan lama dan kurang terbuka terhadap inovasi manajemen.

2. **Keterbatasan Dana Implementasi**

Keterbatasan modal sering menjadi kendala dalam menerapkan rekomendasi, terutama yang membutuhkan investasi awal.

3. **Rendahnya Literasi Manajemen dan Digital**

Kapasitas SDM yang beragam menyebabkan proses implementasi membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.

4. **Ketergantungan Berlebihan pada Konsultan**

Koperasi berisiko kurang mandiri apabila terlalu bergantung pada arahan konsultan tanpa membangun kapasitas internal.

Pemahaman terhadap tantangan ini penting agar proses konsultasi dirancang secara realistis dan adaptif.

Tahapan pelaksanaan Konsultasi Manajemen Koperasi pada Koperasi Desa Merah Putih merupakan proses sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan tahapan yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta antisipasi terhadap tantangan, KMK menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan KDMP yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.



Gambar 2.
Sesi Penyampaian Mater II

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa Pelatihan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Manajemen Koperasi bagi Pendamping Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas pendamping koperasi desa. Pelatihan ini berhasil memperkuat pemahaman pendamping mengenai konsep konsultasi manajemen koperasi, tahapan pendampingan, serta peran strategis pendamping dalam penguatan kelembagaan dan kinerja koperasi desa.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendamping KDMP tidak hanya mengalami peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan perspektif dalam menjalankan perannya. Pendamping mulai memosisikan diri sebagai mitra strategis koperasi desa yang berorientasi pada pemecahan masalah, penguatan tata kelola, dan peningkatan kinerja usaha koperasi. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya menghasilkan luaran berupa peningkatan kompetensi individu pendamping, tetapi juga berpotensi mendorong perbaikan praktik pendampingan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Konsultasi Manajemen Koperasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas pendamping KDMP sebaiknya dilakukan secara periodik dan berjenjang, agar pendamping memiliki kompetensi yang memadai dalam menghadapi dinamika permasalahan koperasi desa.
2. Perlu adanya pendampingan lanjutan berbasis praktik lapangan.
Pelatihan klasikal perlu dilengkapi dengan pendampingan langsung di koperasi desa, sehingga pendamping dapat mengaplikasikan pendekatan konsultasi manajemen koperasi secara nyata dan kontekstual.
3. Perlu penguatan sinergi antara pendamping, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Kolaborasi multipihak penting untuk memastikan keberlanjutan penguatan KDMP, baik melalui dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, maupun pengembangan inovasi manajemen koperasi desa.

BIBLIOGRAFI

- Block, P. 2018. *Konsultasi tanpa rasa takut: Panduan praktis bagi konsultan dan pendamping organisasi* (Terjemahan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, M. S. P. 2019. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta:
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *Pembangunan ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi lokal*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2021. *Model pengembangan koperasi dan BUMDes berbasis potensi lokal*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2021. *Peta jalan pengembangan koperasi modern*. Jakarta: KemenKopUKM RI.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2022. Pedoman pendampingan koperasi. Jakarta: KemenKopUKM RI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2023. Pedoman pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta: KemenKopUKM RI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2024. Petunjuk teknis pendampingan Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta: KemenKopUKM RI.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sedarmayanti. 2018. Manajemen strategi. Bandung: Refika Aditama.
- Sitio, A., & Tamba, H. 2019. Koperasi: Teori dan praktik. Jakarta: Erlangga
- Sumodiningrat, G. 2017. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiyanto, A. 2020. Manajemen koperasi modern. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widodo, S. E. 2020. Manajemen pengembangan organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

